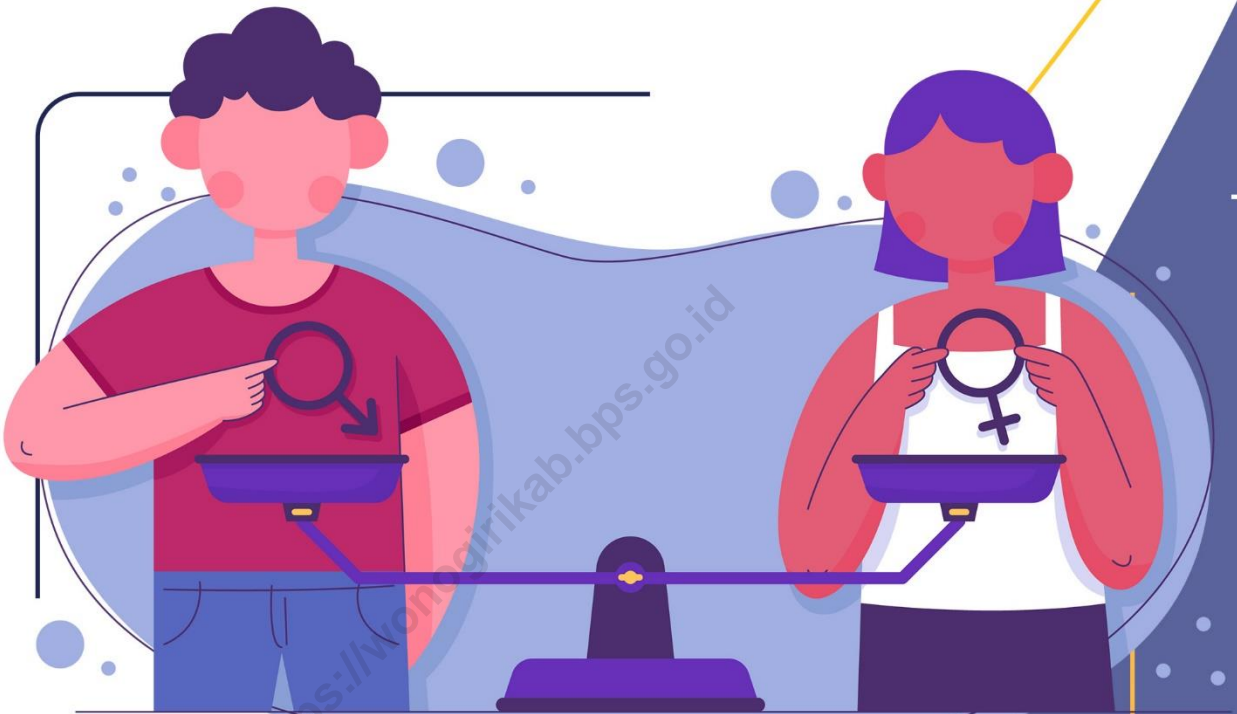


ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN WONOGIRI 2023

Volume 2, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN WONOGIRI 2023

Volume 2, 2024

<https://wonogirikab.bps.go.id>

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER KABUPATEN WONOGIRI 2023

Nomor Publikasi : 33120.24080

Nomor Katalog : 2104028.3312

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 66 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Ilustrasi Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Sumber Ilustrasi : www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rahmad Iswanto, SST., M.Si

Penanggung Jawab:

Kurniawan Dedy Cahyono, SST, SE., M.Si

Editor:

Kurniawan Dedy Cahyono, SST, SE., M.Si

Penulis:

Aditya Etika Sari, SST

Penyusun Tabel:

Aditya Etika Sari, SST

Layout dan Infografis:

Aditya Etika Sari, SST

KATA PENGANTAR



Publikasi Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Wonogiri 2023 terdiri berbagai data dan informasi terpilih seputar Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara, IDG mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Angka IPG dan IDG disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPG dan IDG secara periodik menurut wilayah memungkinkan setiap wilayah mengetahui peta pembangunan manusia berbasis gender didaerahnya, baik pencapaian, kecepatan, posisi maupun disparitas antardaerah. .

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri, serta bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Wonogiri pada masa mendatang.

Wonogiri, Desember 2024
Kepala BPS Kabupaten Wonogiri


Rahmad Iswanto, SST., M.Si

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	vii	
Daftar Tabel dan Gambar	ix	
Daftar Lampiran	xi	
Ringkasan Eksekutif	xiii	
Bab 1	Pendahuluan	1
	1. Latar Belakang.....	3
	2. Tujuan	4
	3. Sistemika Penulisan.....	4
	4. Sumber Data	5
Bab 2	Metodologi	7
	1. Konsep Pembangunan Gender.....	9
	2. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender	10
	3. Perubahan Interpretasi	13
	4. Konsep Pemberdayaan Gender	14
Bab 3	Gambaran Umum Gender di Kabupaten Wonogiri	17
	1. Komposisi Penduduk.....	20
	2. Kesehatan	23
	3. Pendidikan	27
	4. Tenaga Kerja.....	28
	5. Kesempatan dalam Pemerintahan	29

DAFTAR ISI

Bab 4	Capaian Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri	31
	1. IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	35
	2. Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri ...	36
Bab 5	Capaian Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri	43
	1. IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta	44
	2. Perkembangan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri..	46
Bab 6	Kesimpulan	51
	Daftar Pustaka	55
	Lampiran	59

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG.....	12
Tabel 2.2	Dimensi dan Indikator Pembentukan IPG	15
Gambar 3.1	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.....	21
Gambar 3.2	Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.....	22
Gambar 3.3	Piramida Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023	23
Gambar 3.4	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023.....	24
Gambar 3.5	Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023.....	25
Gambar 3.6	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023.....	26
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri,	27
Gambar 3.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023	28
Gambar 3.9	Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2023	29
Gambar 3.10	Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023.....	30
Gambar 4.1	IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta, 2023	35
Tabel 4.1	Komponen IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2023.....	36
Gambar 4.2	Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023	37
Gambar 4.3	Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023	38

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 4.4	Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023..	39
Gambar 4.5	Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023 ..	40
Gambar 4.6	Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023.....	41
Gambar 5.1	IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2023	45
Gambar 5.2	IDG Kabupaten Wonogiri, 2020-2023	46
Gambar 5.3	Komponen IDG Kabupaten Wonogiri, 2017-2023	47
Gambar 5.4	Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023.....	48
Gambar 5.5	Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023	49
Gambar 5.6	Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Beserta Komponennya, 2023	61
Lampiran 2	Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Beserta Komponennya, 2023	64

<https://wonogirikab.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai “warga kelas dua”.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2023 tercatat 92,08 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang tercatat 91,70. Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 72,64 meningkat dibanding IDG Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang tercatat 72,97.

BAB

PENDAHULUAN

1

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

Dari beberapa literatur, konsep gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan (Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, isu-isu terkait gender cukup menarik perhatian terutama pada masalah diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi terjadi dari berbagai aspek kehidupan yaitu berupa perilaku masyarakat yang berasal dari suatu aturan, sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Diskriminasi gender akan melahirkan kesenjangan gender, yang akan menghilangkan hak-hak perempuan atas kesempatan dan kendali pada sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Sebagai pihak yang melahirkan dan mendidik generasi penerus, perempuan harus dilindungi hak-hak hidupnya. Bentuk perlindungan hak-hak tersebut adalah menerima perlakuan yang adil terhadap aspek-aspek dasar manusia, yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang melahirkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat mutlak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui Majelis Umum PBB telah mencetuskan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap permasalahan gender, dan diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang berkaitan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat ini juga sedang dibahas mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta merta masalah-masalah terkait gender akan hilang. Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan. Hal ini seiring dengan pendapat dari UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah

satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1.2 Tujuan

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Publikasi ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). Disamping itu, disajikan pula analisis mengenai angka IPG pada level kabupaten.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari 6 bab, yaitu :

- Bab I : menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan sumber data.
- Bab II : menjelaskan mengenai metodologi penghitungan IPG
- Bab III : menjelaskan mengenai gambaran umum gender di Kabupaten Wonogiri
- Bab IV : menjelaskan mengenai capaian pembangunan gender di Kabupaten Wonogiri

- Bab V : menjelaskan mengenai capaian pemberdayaan gender di Kabupaten Wonogiri
- Bab VI : menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulisan publikasi ini.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Sedangkan data Susenas digunakan untuk menghitung angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara data Sakernas digunakan untuk mendapatkan angka upah serta jumlah angkatan kerja sebagai penunjang penghitungan pendapatan per kapita yang disesuaikan.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB

METODOLOGI

2



DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER



Umur Panjang
dan Hidup Sehat



Pengetahuan



Standar Hidup Layak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

2.1 Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan,

pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable

Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender

Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Maksimum		Minimum	
	Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usia Harapan Hidup (Tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18	18	0	0
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp)	26.572.352		1.007.436	

Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :
 $X_{(i,j)}$: indeks komposit komponen ke-i
 $X_{(i-\min)}$: nilai minimum komponen
 $X_{(i-\max)}$: nilai maksimum komponen

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

$$X_{\text{pendidikan}} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki- laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata- rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_L = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ l} \times X_{pendidikan\ l} \times X_{pengeluaran\ l}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ p} \times X_{pendidikan\ p} \times X_{pengeluaran\ p}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometric ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata- rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi. Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki- laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

2.3 Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki- laki dan perempuan. Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM.

Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki- laki. Dengan demikian, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki. Oleh karena IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki maka metode perhitungan IPG yang dilakukan

oleh BPS pun berbeda dengan GDI yang dilakukan oleh UNDP. Hal ini disebabkan cara menghitung IPM yang berbeda dengan HDI, sedangkan menghitung IPG didahului dengan menghitung IPM.

2.4 Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran well-being. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Pembentukan IPG

Dimensi	Indikator
(1)	(2)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki – laki dan perempuan
Pengambilan Keputusan	Proporsi dan manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki – laki dan perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki – laki dan perempuan

Sumber : BPS

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006).

Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai indeks ketidaksetaraan gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

Saat ini, penghitungan Gender Empowerment Measure (GEM) oleh UNDP sebagai pendekatan nilai IDG secara internasional sudah tidak dilakukan. Penghitungan GEM ini digantikan oleh Gender Inequality Index (GII).

BAB

3

GAMBARAN UMUM GENDER

DI KABUPATEN WONOGIRI

Tahun 2023

KOMPOSISI PENDUDUK

Penduduk Menurut Jenis Kelamin



524,50 ribu jiwa



526,58 ribu jiwa

KESEHATAN

Angka Kesakitan



8,46 persen



9,46 persen

TENAGA KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



90,21 persen



74,80 persen

PENDIDIKAN

Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi (persen)



PT	5,56	5,78
SMA/ sederajat	24,74	21,99
SMP/ sederajat	24,66	21,50
SD/ sederajat	33,30	32,23
Tidak Tamat SD	7,25	8,98
Tidak Pernah Sekolah	4,49	9,52

KESEMPATAN DALAM PEMERINTAH

PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

D4/S1+	2.449	3.041
DIII	263	888
DI/DII	245	16
SMA/ sederajat	46	219
SMP/ sederajat	68	0
Sampai dengan SD	7	0

Istilah gender sangat terkait dengan paradigma yang berlaku pada masyarakat, yaitu perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memiliki budaya patriarki, perbedaan tersebut cukup jelas terjadi di masyarakat. Pada praktiknya, perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan melalui praktik-praktik nilai-nilai budaya, sosial dan nilai-nilai kehidupan lainnya tidak dapat dihindari.

Selama ini peran publik dan domestik menjadi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki cenderung berperan dalam aktivitas publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan pendapatan. Sedangkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat selama ini. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini tidak terlepas dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga. Sementara untuk mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki. Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Disamping itu budaya patriarki yang masih kuat berkembang pada masyarakat Indonesia, terkadang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua. Salah satunya adalah kurang diakuinya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingannya belum banyak terwakili. Hal ini juga berdampak pada ketidaksetaraan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

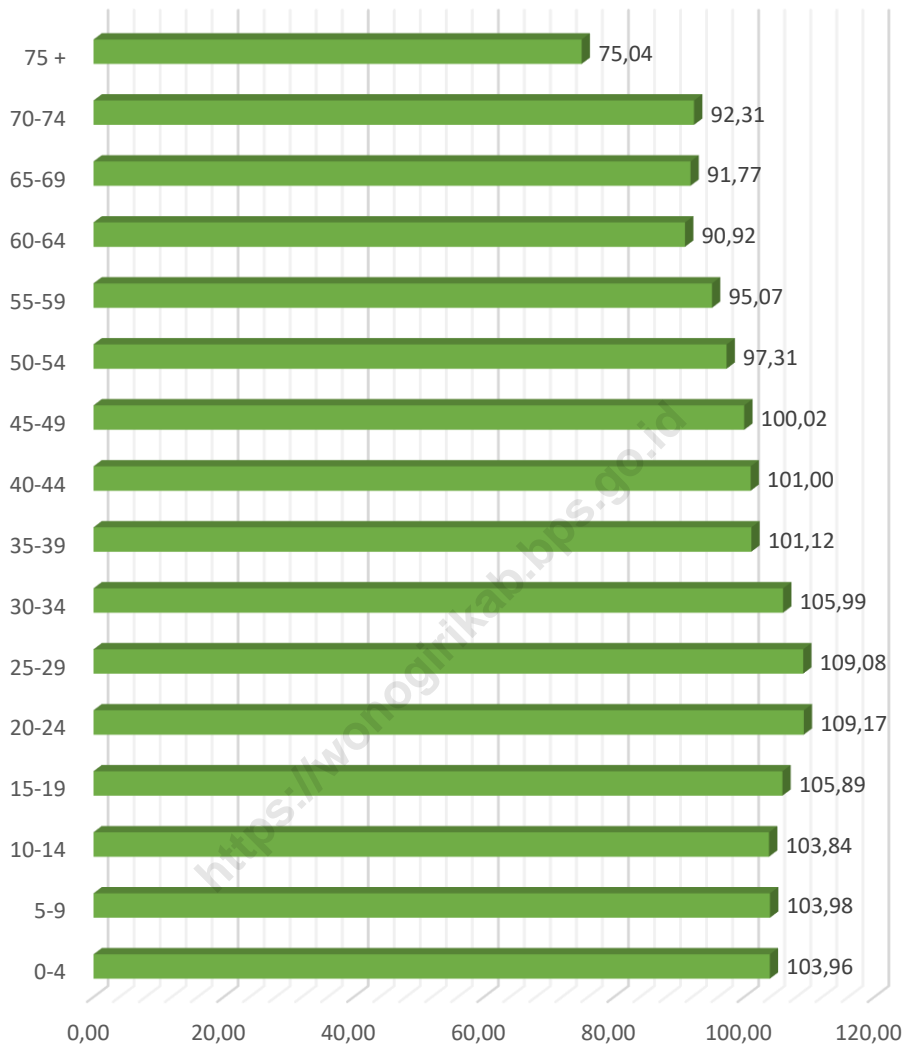
Pada perkembangannya, saat ini perempuan Indonesia sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Terlihat dari banyaknya perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Di samping itu banyak prestasi- prestasi yang diperoleh para perempuan Indonesia pada level nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki oleh perempuan

Indonesia, tidak kalah dengan laki-laki. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

3.1 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebanyak 524.500 jiwa, atau 49,90 persen dari penduduk Kabupaten Wonogiri. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebanyak 526.585 jiwa, atau 50,10 persen dari penduduk Kabupaten Wonogiri. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonogiri sebesar 99,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia 0 - 49 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, karena umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok umur 75 + rasio jenis kelamin sebesar 75,04 yang menunjukkan terdapat 75,04 laki – laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di kelompok umur 75+ memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan kelompok lain.

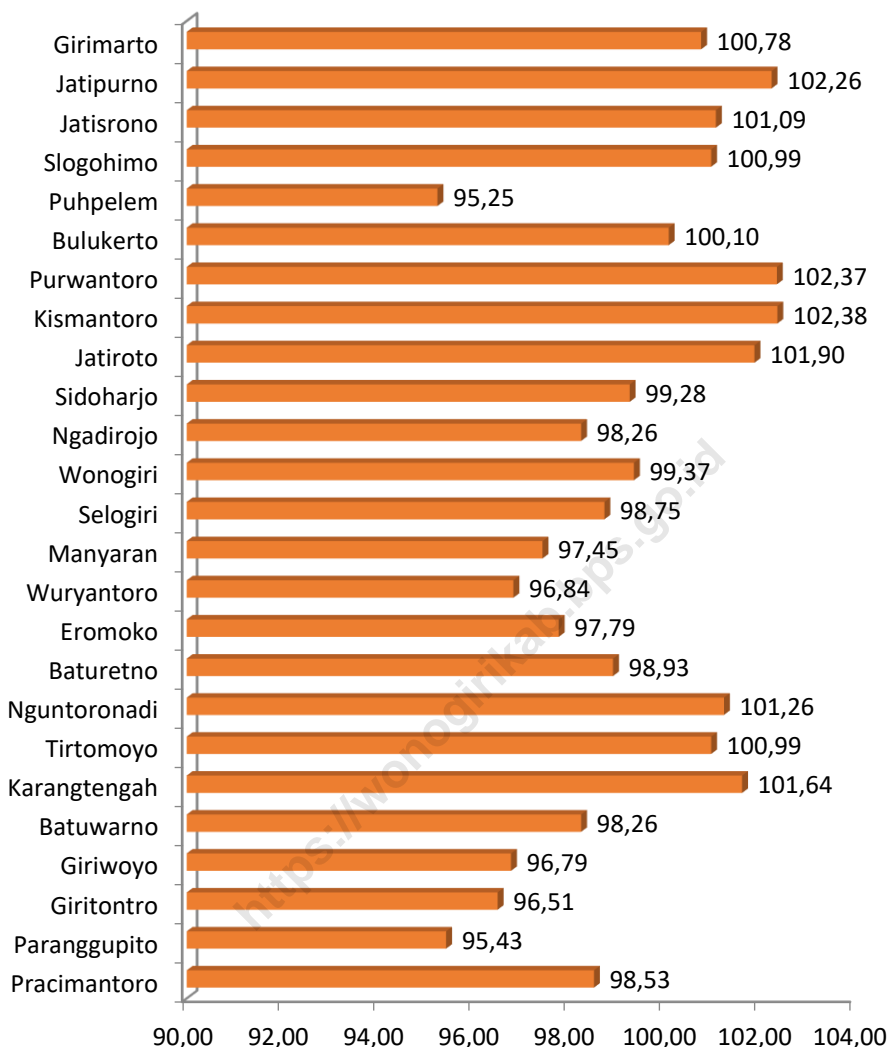
Gambar 3.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kecamatan. Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level kabupaten, yaitu penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki. Namun demikian, di beberapa kecamatan lain tercatat lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi dicatat oleh Kecamatan Kismantoro (102,38) dan terendah ditemukan di Kecamatan Puhpelem (95,25).

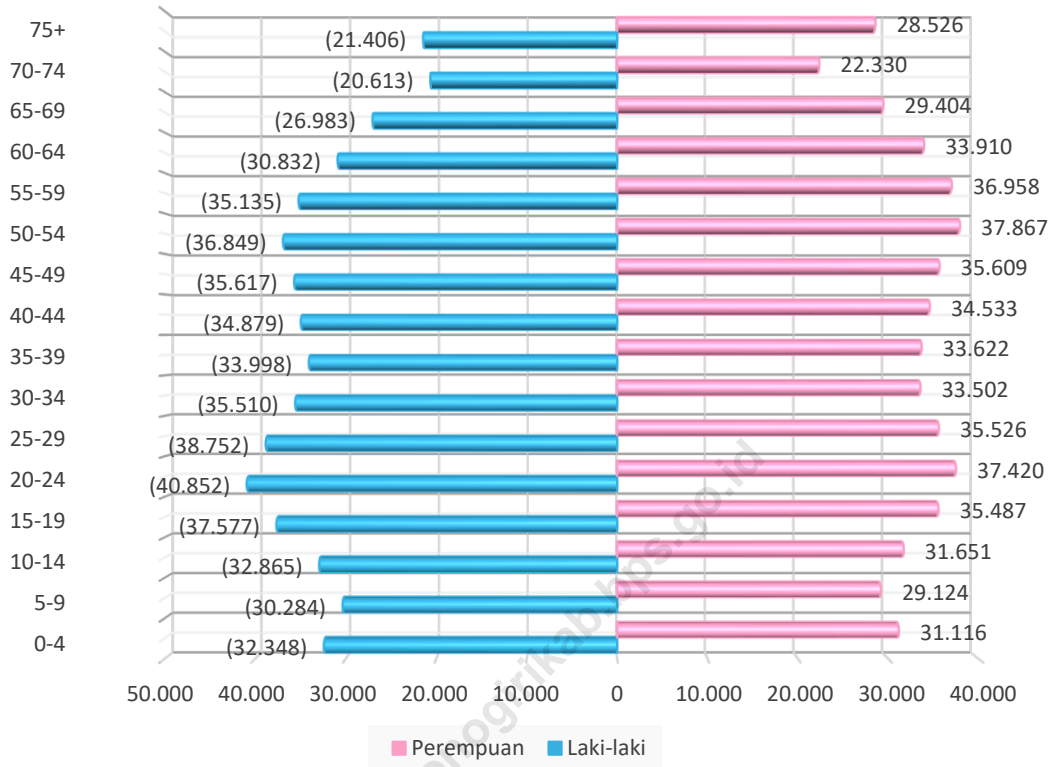
Gambar 3.2. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020

Tak kalah penting peran perempuan adalah dalam sisi produktivitas, yaitu sebagai penyumbang angkatan kerja. Dari komposisi penduduk, kelompok usia di atas 50 tahun, di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah, namun sebaliknya, jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

Gambar 3.3. Piramida Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023



Sumber : Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2024

3.2 Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses serta dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Pemerintah menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan Angka Kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, merata serta terjangkau, dengan memberikan

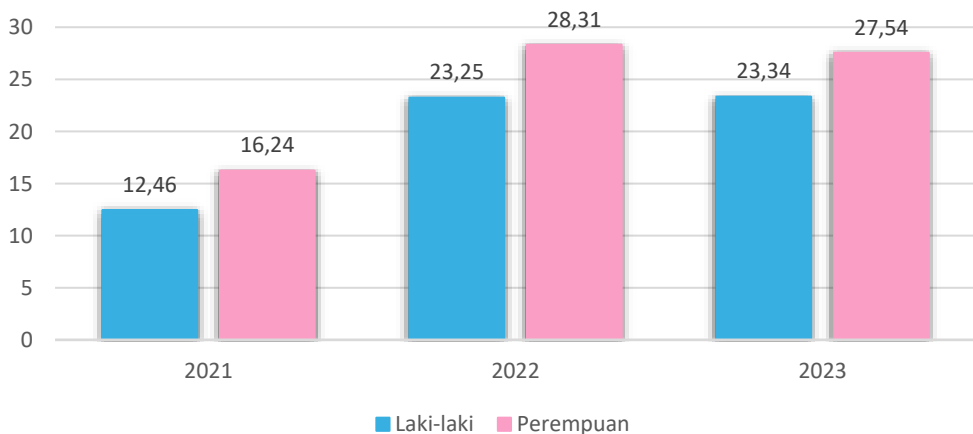
pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

3.3.1 Kualitas Kesehatan Masyarakat

Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitive terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2023 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan juga lebih banyak pada kelompok laki – laki dibanding perempuan yaitu sebesar 27,54 persen.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023

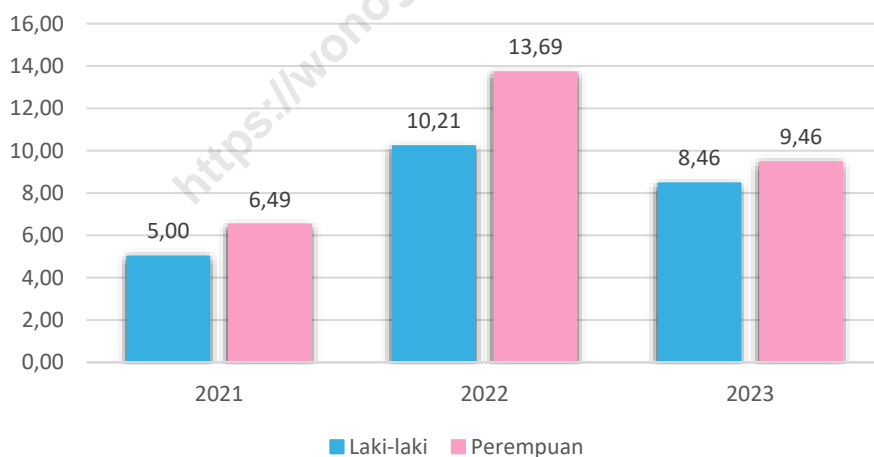


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021-2023

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2023 menunjukkan angka kesakitan penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri mencapai 9,46 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki laki pada kurun waktu tahun 2021 - 2023. Angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, diantaranya disebabkan perilaku dan gaya hidup manusia.

Gambar 3.5. Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021-2023

3.3.2 Akses Kesehatan Masyarakat

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan

memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari 23,34 persen penduduk laki – laki yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, ternyata 31,07 persen penduduk yang berobat jalan. Dari 27,54 persen penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, ternyata 34,65 persen penduduk yang berobat jalan. Dalam kurun waktu 2021-2022, penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan memiliki kecenderungan melakukan berobat jalan lebih besar. Namun, pada tahun 2023, penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan memiliki kecenderungan melakukan berobat jalan lebih besar yaitu sebesar 34,65 persen.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2021-2023

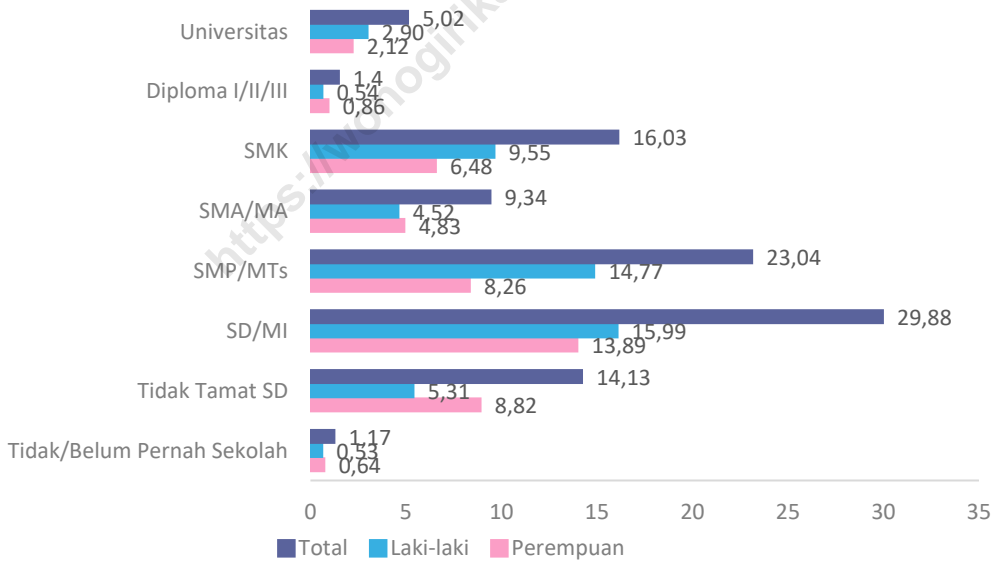


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021-2023

3.3 Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Kabupaten Wonogiri, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang (Gambar 3.7). Pada jenjang pendidikan SD hingga Universitas, persentase laki - laki yang mendapatkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan melebihi persentase perempuan. Sedangkan persentase penduduk perempuan yang mendapatkan persentase lebih bear hanya ada di jenjang pendidikan SMA dan Diploma I/II/III yaitu sebesar 4,83 persen dibandingkan persentase penduduk laki -laki yang sebesar 0,86 persen.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2023



Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri Hasil Sakernas Agustus 2023

Semakin berkurangnya kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa budaya masyarakat Kabupaten Wonogiri yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding perempuan sudah mulai memudar. Namun, pada jenjang pendidikan sekolah menengah persentase perolehan ijazah laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan. Demikian pula dengan persentase perempuan yang tidak memiliki

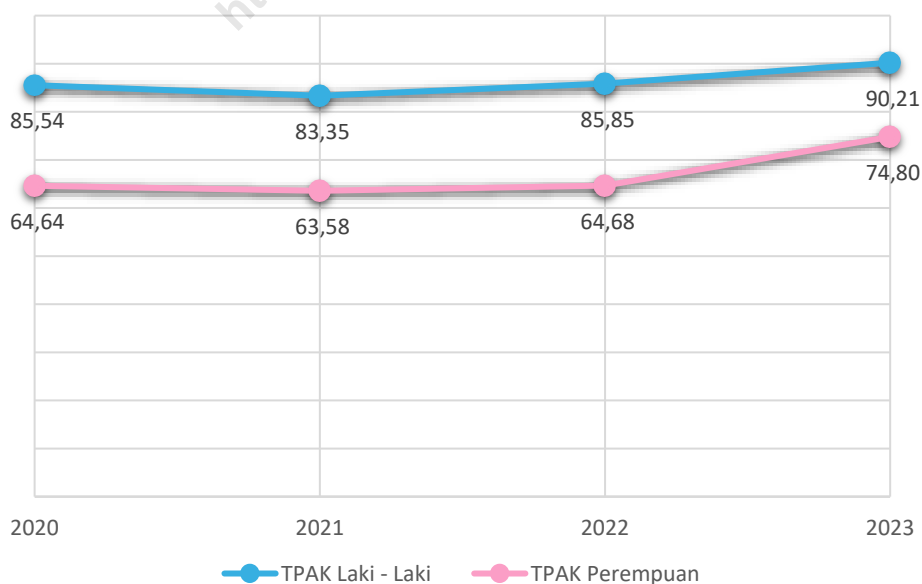
ijazah, juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

3.4 Tenaga Kerja

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Perbedaan kesempatan kerja tersebut berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2023 angka TPAK perempuan hanya sekitar 74,80 persen, sedangkan TPAK laki-laki sudah mencapai sekitar 90,21 persen. Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Pada tahun 2023 TPAK perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami kenaikan, jika dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki mengalami kenaikan 5,08 poin, sedangkan TPAK perempuan hanya naik 15,65 poin.

Gambar 3.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023

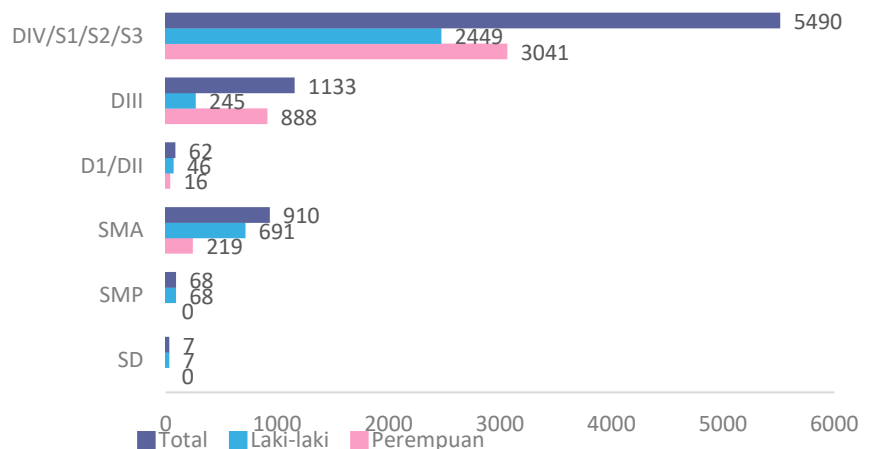


Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2020 - 2023

3.5 Kesempatan Dalam Pemerintahan

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perempuan harus mewakili aspirasinya pada lembaga legislatif. Dengan duduk pada lembaga legislatif, maka kepentingan perempuan akan mampu diperjuangkan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menjadi salah satu indikator kesetaraan gender dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen, sepertinya belum memenuhi. Bahkan pada tahun 2022, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Wonogiri baru mencapai 16 persen. Data Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, dari 50 orang anggota DPRD, jumlah anggota DPRD perempuan hanya 8 orang. Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin tinggi. Jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN Laki-laki. Jika dilihat menurut pendidikannya, ASN perempuan lebih unggul dibanding ASN laki-laki (Gambar 3.8). Hal ini terlihat dari jumlah ASN perempuan dengan tingkat pendidikan Diploma III ke atas lebih banyak dibandingkan ASN Laki-laki. Banyaknya jumlah ASN perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuktikan kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki semakin tinggi pada sektor Pemerintahan. Keinginan untuk disamakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tapi juga sebagai bentuk capaian emansipasi perempuan saat ini.

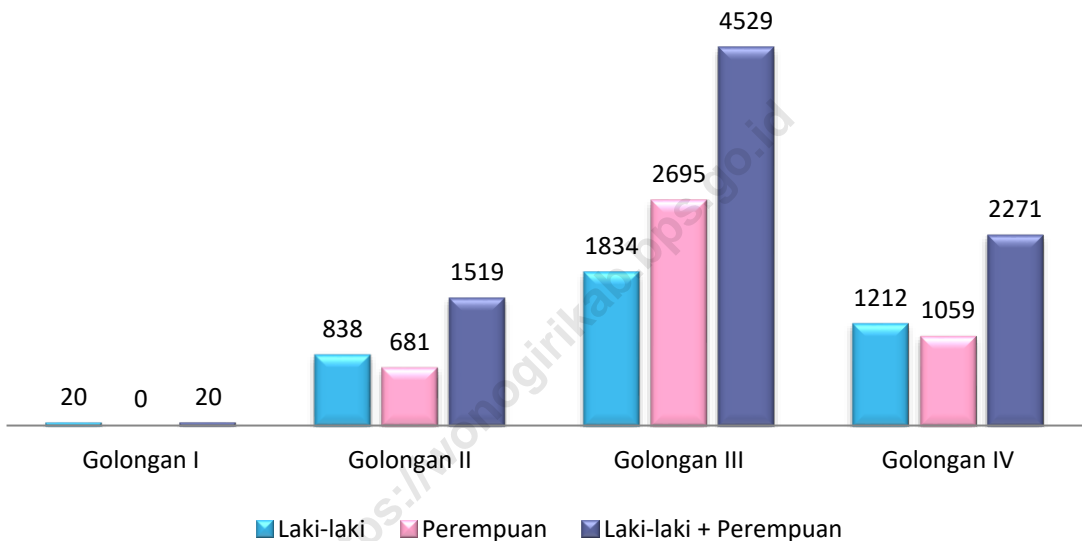
Gambar 3.9. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2023



Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2024

Jabatan menjadi salah satu hal yang diinginkan bagi sebagian masyarakat. Tidak heran jika jabatan juga menentukan jenjang karir hingga pendapatan dalam sebuah pekerjaan. Jumlah ASN perempuan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadi fungsional tertentu lebih banyak jika dibandingkan dengan ASN laki-laki. Sementara itu, pejabat struktural laki-laki lebih banyak dibandingkan pejabat struktural perempuan.

Gambar 3.10. Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah di Kabupaten Wonogiri, 2023



Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2024

BAB

4

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

IPG Tahun 2023

92,08

Komponen :



UHH	74,78	78,48	tahun
HLS	12,54	12,44	tahun
RLS	8,12	7,32	tahun
Pengeluaran	13.997	9.158	ribu rupiah
IPM	75,98	69,96	

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan

pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus dihilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dengan demikian, perempuan akan memiliki peluang dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan mempunyai akses untuk mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya tersebut.

Dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan di Indonesia akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Pertama kali IPG diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

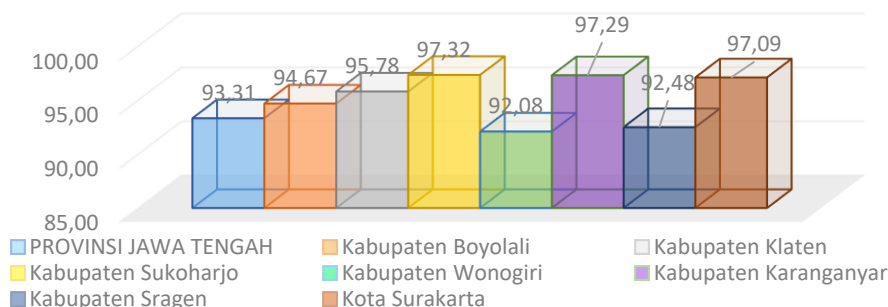
IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dari angka IPG diharapkan mampu memberikan perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Secara umum, pembangunan manusia secara kuantitatif telah digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.

4.1 IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Di dalam lingkup Eks Karesidenan Surakarta, Kabupaten Wonogiri sudah berada posisi ketujuh dari tujuh kab/kota yaitu sebesar 92,08. Angka IPG Kabupaten Wonogiri juga lebih rendah jika dibandingkan IPG Provinsi Jawa tengah. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan IDG Kabupaten Wonogiri menempati posisi pertama dari tujuh kab/kota yaitu sebesar 0,38 point. Pertumbuhan ini juga menempati posisi keenam dari 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Capaian pembangunan akan terlihat dari peningkatan indikator- indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Perbandingan pembangunan terkait gender antarprovinsi di Pulau Jawa dapat dilakukan dengan capaian pembangunan dari masing-masing komponen pembentuknya.

Gambar 4.1. IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta, 2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023

Tabel 4.1. Komponen IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2023

Prov/Kab/Kota		Kab Boyolali	Kab Klaten	Kab Sukoharjo	Kab Wonogiri	Kab Karanganyar	Kab Sragen	Kota Surakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UHH	LAKI-LAKI	74,44	75,29	76,22	74,78	75,95	74,18	75,86
	PEREMPUAN	78,17	79,03	79,88	78,48	79,72	77,91	79,55
	TOTAL	76,23	77,07	77,86	76,56	77,72	75,97	77,63
HLS	LAKI-LAKI	12,38	13,39	13,86	12,54	13,36	12,90	14,85
	PEREMPUAN	13,41	13,54	14,51	12,44	13,79	12,96	14,97
	TOTAL	12,66	13,41	13,91	12,52	13,71	12,92	14,90
RLS	LAKI-LAKI	8,74	9,89	10,11	8,12	9,46	8,45	11,45
	PEREMPUAN	7,52	8,68	9,47	7,32	8,60	7,38	10,81
	TOTAL	8,09	9,27	9,84	7,67	9,02	7,87	11,00
PPP	LAKI-LAKI	18.396	14.301	13.349	13.997	12.876	18.109	16.265
	PEREMPUAN	13.172	12.426	11.658	9.158	11.755	11.891	14.471
	TOTAL	13.716	12.968	12.319	10.283	12.260	13.439	15.870
IPM	LAKI-LAKI	79,05	79,67	80,16	75,98	78,33	78,98	82,17
	PEREMPUAN	74,84	76,31	78,01	69,96	76,21	73,04	82,17
	TOTAL	75,41	77,59	78,65	71,97	77,31	75,10	83,54
IPG		94,67	95,78	97,32	92,08	97,29	92,48	97,09

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023

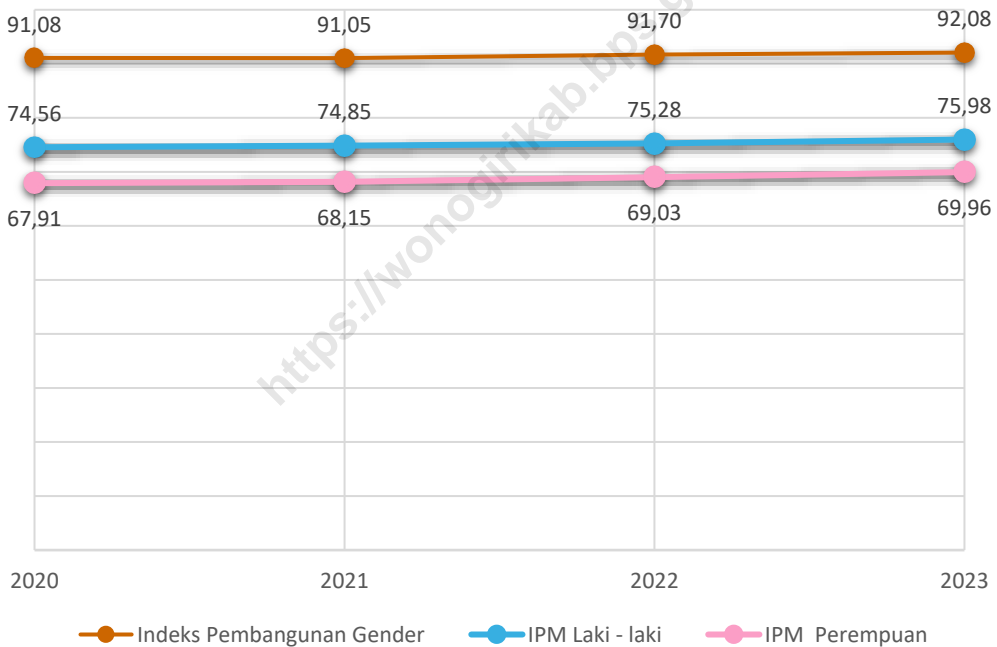
4.2 Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2023 tercatat 92,08 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang tercatat 91,70. IPG ini merupakan perbandingan capaian IPM laki-laki terhadap capaian IPM Perempuan. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sebesar 75,98 dan perempuan sebesar 69,96. Pada tahun 2020 hingga 2023, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), sedangkan IPM perempuan masih berstatus 'sedang' (antara 60

sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2022 hingga 2023, pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,93 persen, sementara perempuan 1,35 persen. Pada tahun 2020 ke 2021 terdapat penurunan IPG dan kembali naik lagi di tahun 2022 hingga mencapai angka IPG 92,08 pada tahun 2023. Angka ini memiliki jumlah yang paling besar selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2023 IPM perempuan hanya tumbuh 0,93 poin sementara IPM laki-laki tumbuh hingga 0,70 poin.

Gambar 4.2. Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023



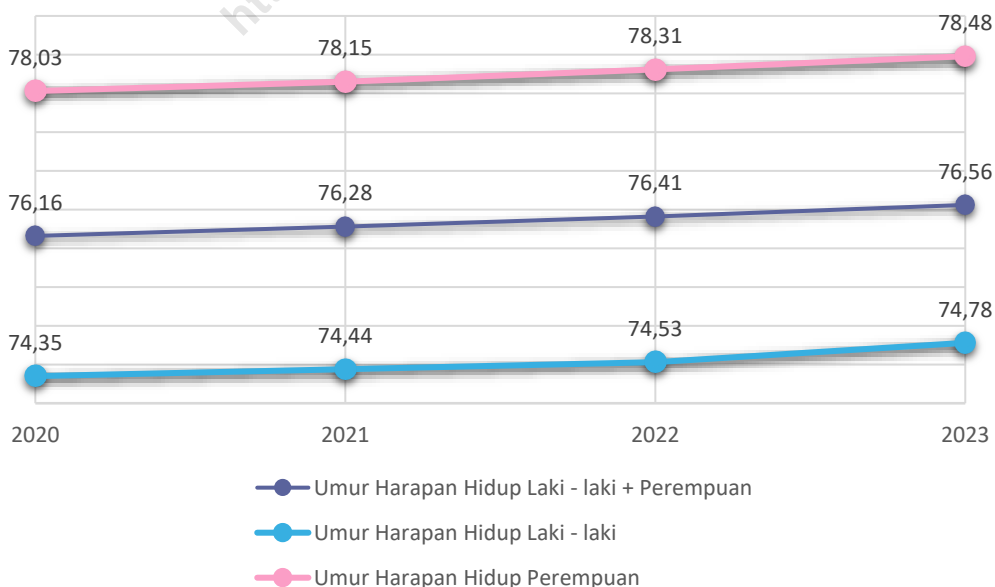
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2023

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Dalam jurnal Bio Essays, diketahui, kekuatan perempuan ada pada tambahan kromosom X pada perempuan. Kromosom inilah yang memberikan akses ke mikroRNA, molekul-molekul

yang meregulasi protein yang dibutuhkan untuk sistem imunitas. Sabra Klein, profesor mikrobiologi dan imunologi molekuler di *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health* di US menyatakan salah satu alasan perempuan secara umum memiliki respon imun yang lebih kuat ketimbang laki-laki adalah karena faktor gen dan hormon (beritasatu.com, 2011). Hal inilah yang secara umum mempengaruhi umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Pada tahun 2023 UHH perempuan di Kabupaten Wonogiri telah mencapai 78,48 tahun, sementara laki-laki mencapai 74,78 tahun. Dari gambar berikut bisa dilihat nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya dalam kurun waktu 2020 - 2023 mengalami peningkatan yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi tidak lagi muncul di Kabupaten Wonogiri. Peningkatan nilai UHH sendiri juga lebih banyak di jenis kelamin laki - laki dari tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 0,25 poin untuk laki-laki dibanding 0,17 poin untuk perempuan.

Gambar 4.3. Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023

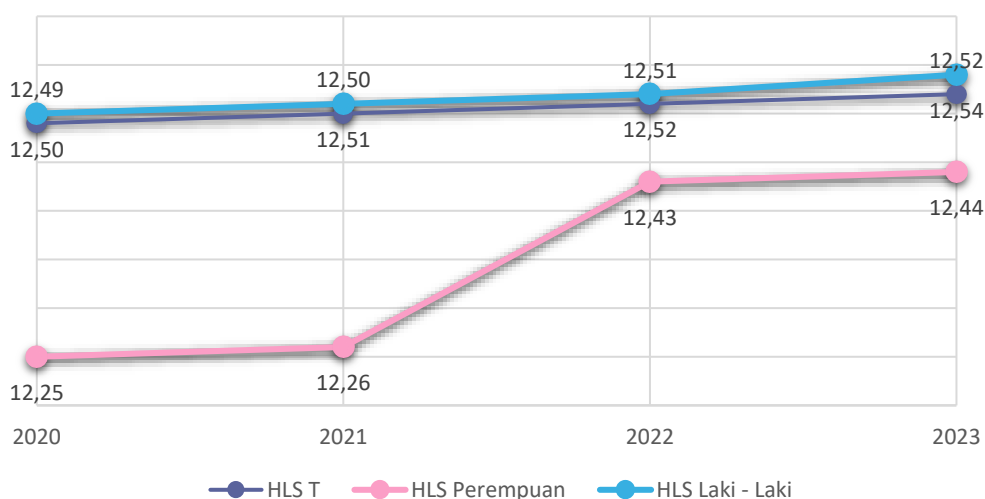


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 - 2023

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan. Todaro (2006) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan.

Salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang serta menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan. Pada tahun 2023 HLS perempuan adalah 12,44 tahun dan laki-laki sebesar 12,54 persen. Ini berarti anak-anak laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Wonogiri yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga SMA/ sederajat. Dengan nilai pencapaian tersebut, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan telah dapat diwujudkan secara merata.

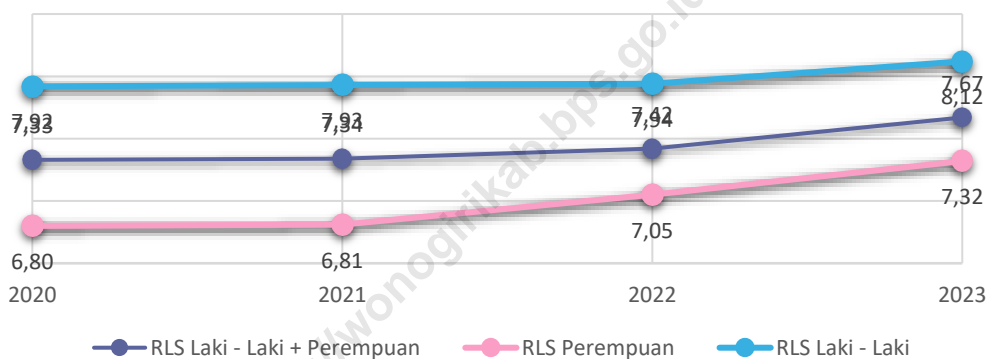
Gambar 4.4. Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 – 2023

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2020 - 2023 Persentase rata – rata lama sekolah laki–laki lebih besar dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, rata-rata pendidikan yang dijalani oleh laki- laki adalah sekitar 8,12 tahun, sedangkan perempuan 7,32 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Wonogiri berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas VII.

Gambar 4.5. Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 – 2023

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

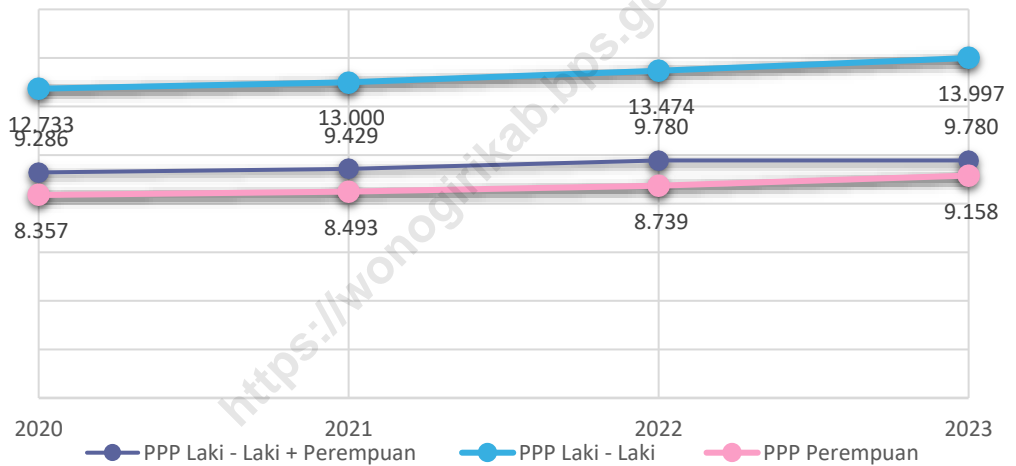
Dari gambar di bawah tampak bahwa meskipun pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun perekonomian di Kabupaten Wonogiri masih didominasi oleh laki-laki.

Selama periode 2020 hingga 2023, nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki - laki adalah sebesar 13,997 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan adalah sebesar 9,780 juta rupiah. Rasio Pengeluaran Per

Kapita pada tahun 2023 sebesar 0,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Wonogiri didominasi oleh laki-laki, dimana pengeluaran per kapita perempuan tidak lebih dari 65%

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, perdagangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Gambar 4.6. Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020 – 2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 – 2023

BAB

5

CAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

IDG Tahun 2023

72,64

Komponen :

Persentase
Keterlibatan
di Parlemen



84,00



16,00

persen

Persentase Tenaga
Manager Profesional,
Administrasi, Teknisi

50,51

49,49

persen

Sumbangan Dalam
Pendapatan Kerja

61,04

38,96

persen

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

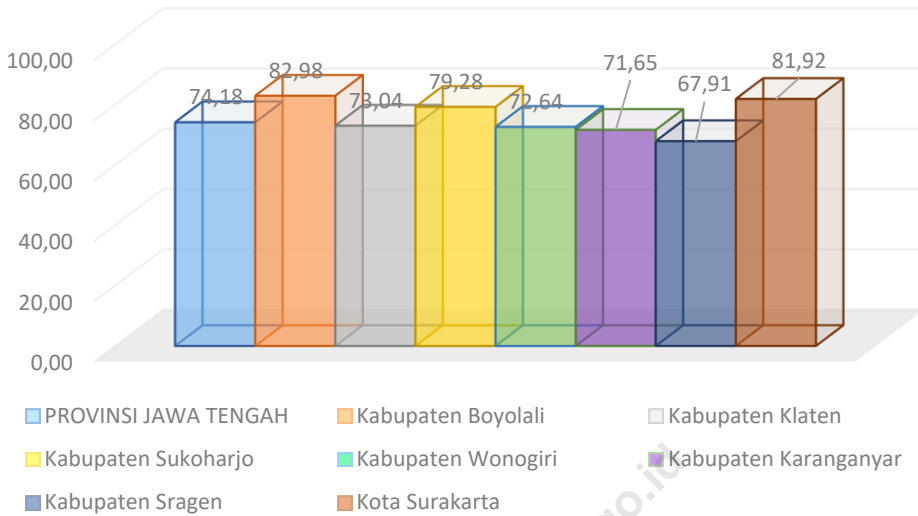
Sistem patriaki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mencakup mulai dari ranah personal (kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam ruang privat dengan pelaku orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan) hingga lainnya. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi dalam berbagai budaya yang berbeda. Upaya pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender menjadi langkah penting proses modernisasi masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang disusun oleh UNDP.

5.1 IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta

Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 72,64, dalam lingkup eks karesidenan Surakarta, menempati posisi ke lima dari tujuh kabupaten/kota. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Namun, IDG Kabupaten Wonogiri yang tercatat lebih rendah dibanding IDG Jawa Tengah. IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,33 poin atau meningkat sebesar 0,45 persen.

Gambar 5.1. IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2023

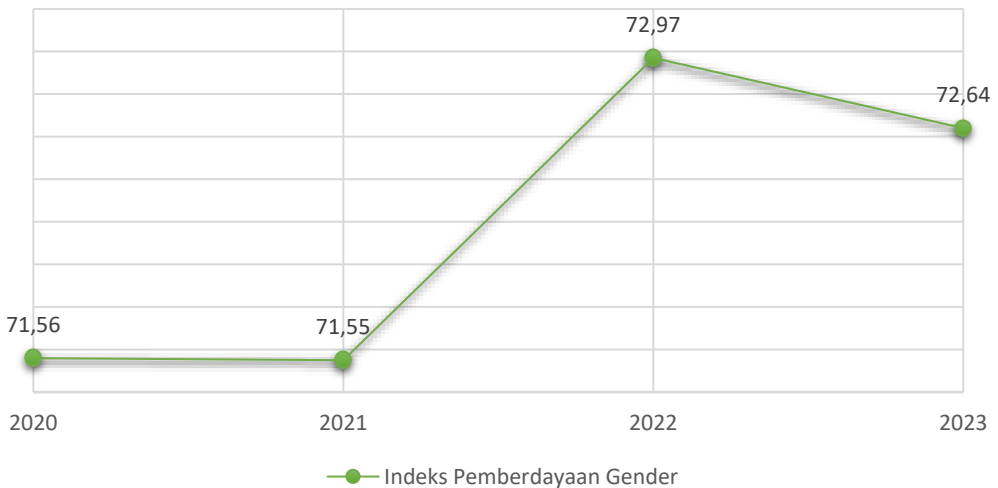


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023

5.2 Perkembangan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri

Pemberdayaan gender di Kabupaten Wonogiri pada periode 2020 – 2023 cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Wonogiri berada pada level 71,56, menurun 0,01 poin atau turun 0,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 naik 1,42 poin atau naik 1,98 persen, tahun 2022 menurun 0,33 poin atau turun 0,45 persen.

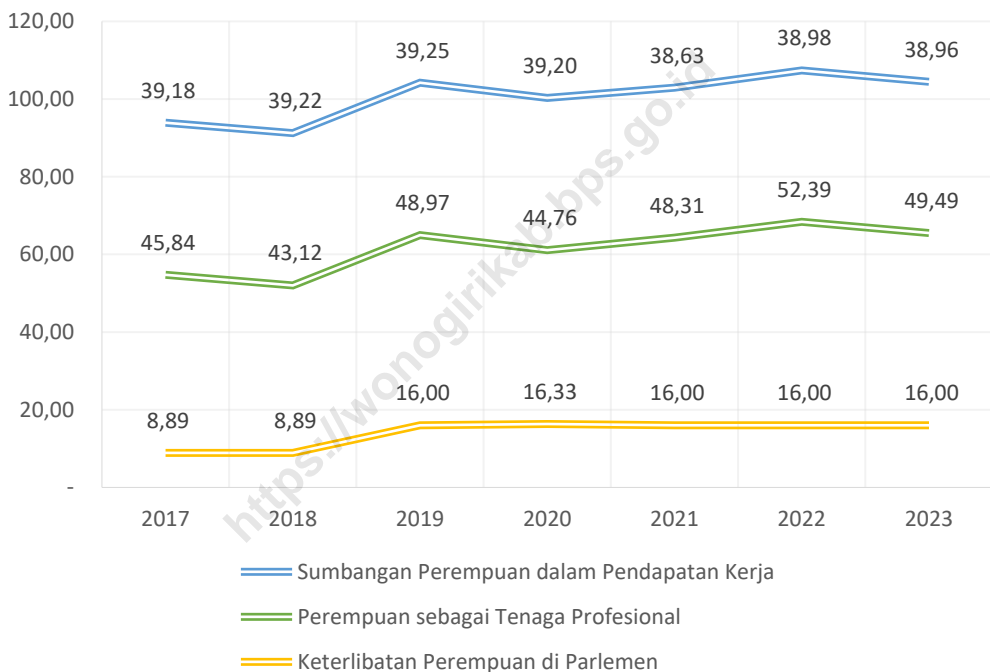
Gambar 5.2. IDG Kabupaten Wonogiri, 2020-2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2023

Penurunan IDG tahun 2023 terutama terjadi karena kenaikan komponen persentase persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional menurun 2,90 poin dari 52,39 persen pada tahun 2022, menjadi 49,49 persen pada tahun 2023. Demikian juga persentase perempuan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja menurun 0,02 poin dari 38,98 persen pada tahun 2022 menjadi 38,96 persen pada tahun 2023. IDG pada periode tahun 2022-2023 terjadi penurunan.

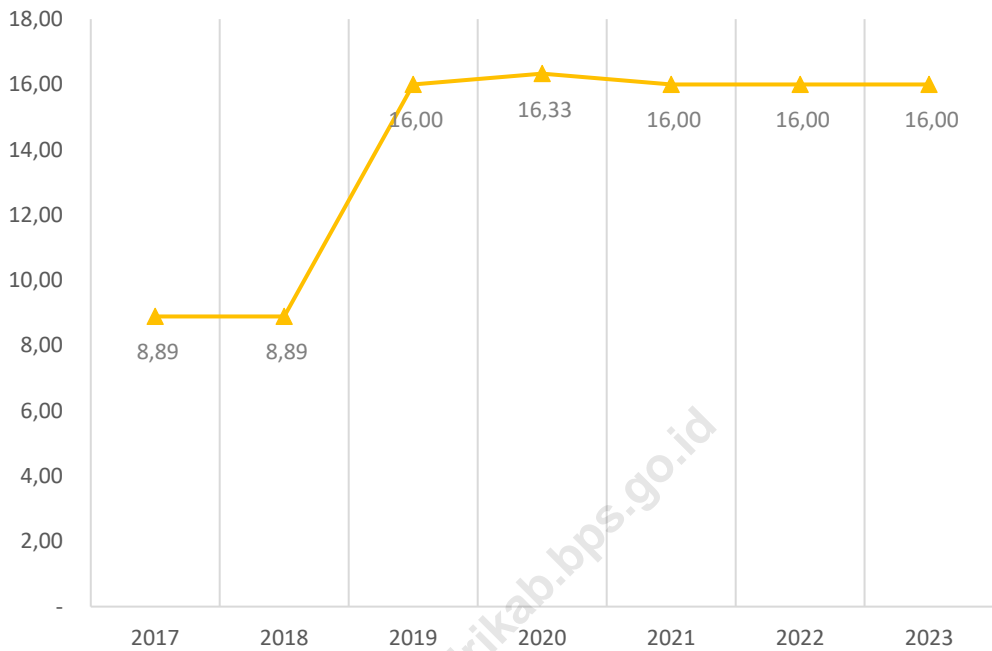
Gambar 5.3. Komponen IDG Kabupaten Wonogiri, 2017-2023



Sumber : BPS

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30 persen anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Wonogiri pada periode 2017 meningkat dari 8,89 persen menjadi 16,00 persen, kemudian cenderung sama menurun sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 16,00 persen.

Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023

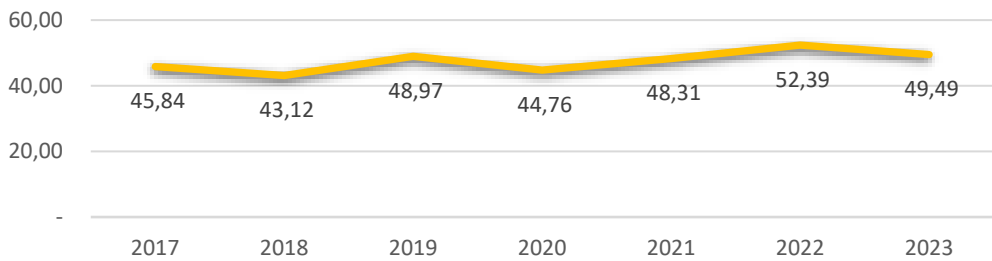


Sumber : BPS

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia (BPS, 2018).

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen yang selalu meningkat ini berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah. Tahun 2017 hingga tahun 2023, persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan fluktuasi, yaitu pada tahun 2018 tercatat hanya sebesar 43,12 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 52,3 persen, namun sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

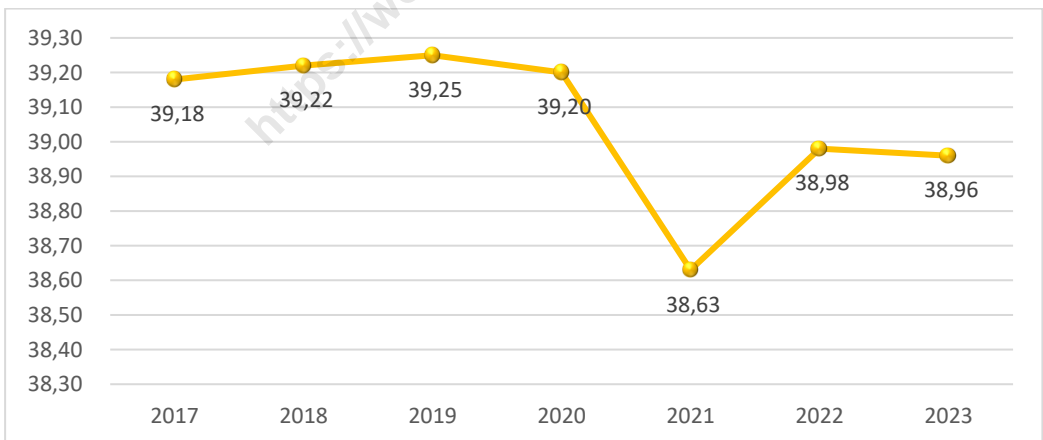
Gambar 5.5. Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023



Sumber : BPS

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Wonogiri cenderung berfluktuasi, yaitu tahun 2017 sebesar 39,18 persen terus naik hingga menjadi sebesar 39,25 persen pada tahun 2019, kemudian turun hingga tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini memiliki tren meningkat dan diharapkan akan semakin meningkat.

Gambar 5.6. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Wonogiri, 2017-2023



Sumber : BPS

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB

KESIMPULAN

6

2023



IPM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

71,97



IPG

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

92,08



IDG

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

72,64



Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2023 tercatat 92,08 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang tercatat 91,70. IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sebesar 75,98 dan perempuan sebesar 69,96. Pada tahun 2023, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), sedangkan IPM perempuan masih berstatus 'sedang' (antara 60 sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2012 hingga sekarang. Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 72,64 menurun dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang tercatat 72,97.

DAFTAR PUSTAKA

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2024). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2024. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2023). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2023. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2022). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2022. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2021). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2021. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2020). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2020. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2019). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2019. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2023. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2023. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Agustus 2023. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Jawa Tengah Dalam Angka 2023. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2023. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2017. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2022. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2022. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2021. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2020. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2019. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2017. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Beserta Komponennya, 2023

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM (UHH SP2010)		IPM (UHH SP2020)		IPG	
		Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan	UHH SP2010	UHH LF SP2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	77,13	71,63	77,13	71,97	92,87	93,31
3301	Cilacap	76,77	67,05	76,98	67,57	87,34	87,78
3302	Banyumas	77,91	69,45	78,00	69,79	89,14	89,47
3303	Purbalingga	73,79	69,00	74,06	69,46	93,51	93,79
3304	Banjarnegara	71,08	67,59	71,09	67,60	95,09	95,09
3305	Kebumen	74,85	69,89	75,36	70,37	93,37	93,38
3306	Purworejo	76,58	73,01	76,63	73,09	95,34	95,38
3307	Wonosobo	72,77	67,64	73,68	68,41	92,95	92,85
3308	Magelang	75,77	70,08	75,86	70,48	92,49	92,91
3309	Boyolali	79,02	74,83	79,05	74,84	94,70	94,67
3310	Klaten	79,64	76,29	79,67	76,31	95,79	95,78
3311	Sukoharjo	80,12	78,01	80,16	78,01	97,37	97,32
3312	Wonogiri	75,95	69,96	75,98	69,96	92,11	92,08
3313	Karanganyar	78,33	76,21	78,33	76,21	97,29	97,29
3314	Sragen	78,96	73,03	78,98	73,04	92,49	92,48
3315	Grobogan	77,92	67,19	77,92	67,20	86,23	86,24
3316	Blora	75,62	64,79	75,62	64,79	85,68	85,68
3317	Rembang	76,60	67,16	76,60	67,49	87,68	88,11
3318	Pati	77,91	72,06	77,94	72,06	92,49	92,46
3319	Kudus	80,28	75,33	80,30	75,33	93,83	93,81
3320	Jejara	77,76	71,17	77,76	71,17	91,53	91,53
3321	Demak	78,61	71,67	78,63	71,68	91,17	91,16
3322	Semarang	76,88	74,30	76,90	74,31	96,64	96,63
3323	Temanggung	73,29	70,50	73,34	70,50	96,19	96,13
3324	Kendal	76,95	72,56	76,95	72,56	94,29	94,29
3325	Batang	73,90	68,34	73,90	68,34	92,48	92,48
3326	Pekalongan	74,90	69,53	74,95	69,58	92,83	92,84
3327	Pemalang	72,93	63,55	72,96	63,59	87,14	87,16
3328	Tegal	75,24	66,69	76,25	67,51	88,64	88,54
3329	Brebes	72,47	63,14	74,38	64,78	87,13	87,09
3371	Kota Magelang	83,22	80,25	83,26	80,25	96,43	96,38
3372	Kota Surakarta	84,58	82,17	84,63	82,17	97,15	97,09
3373	Kota Salatiga	88,05	84,04	88,09	84,04	95,45	95,40
3374	Kota Semarang	86,48	82,99	86,53	82,99	95,96	95,91
3375	Kota Pekalongan	79,52	76,06	79,52	76,06	95,65	95,65
3376	Kota Tegal	80,65	75,52	80,71	75,61	93,64	93,68

Kode	Prov/Kab/Kota	UHH (SP2010)		UHH (LF SP2020)	
		Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)
3300	JAWA TENGAH	72,95	76,62	72,95	77,40
3301	Cilacap	72,48	76,20	72,93	77,46
3302	Banyumas	72,20	75,94	72,39	76,73
3303	Purbalingga	71,57	75,36	72,17	76,43
3304	Banjarnegara	72,71	76,41	72,74	76,44
3305	Kebumen	72,05	75,80	73,18	76,90
3306	Purworejo	73,47	77,11	73,57	77,29
3307	Wonosobo	70,21	74,19	72,20	75,97
3308	Magelang	72,45	76,15	72,63	77,06
3309	Boyolali	74,39	78,14	74,44	78,17
3310	Klaten	75,22	78,99	75,29	79,03
3311	Sukoharjo	76,14	79,88	76,22	79,88
3312	Wonogiri	74,72	78,48	74,78	78,48
3313	Karanganyar	75,94	79,72	75,95	79,72
3314	Sragen	74,14	77,89	74,18	77,91
3315	Grobogan	73,30	76,95	73,30	76,96
3316	Blora	72,95	76,64	72,96	76,64
3317	Rembang	73,02	76,69	73,02	77,51
3318	Pati	74,55	78,31	74,60	78,31
3319	Kudus	75,02	78,78	75,08	78,78
3320	Jepara	74,24	77,99	74,25	77,99
3321	Demak	73,77	77,48	73,81	77,52
3322	Semarang	74,12	77,86	74,16	77,87
3323	Temanggung	73,95	77,69	74,06	77,69
3324	Kendal	72,84	76,51	72,84	76,52
3325	Batang	73,12	76,77	73,12	76,77
3326	Pekalongan	72,11	75,84	72,21	75,95
3327	Pemalang	72,09	75,82	72,17	75,94
3328	Tegal	70,05	74,05	72,20	75,98
3329	Brebes	68,03	71,98	72,14	75,93
3371	Kota Magelang	75,37	79,14	75,44	79,15
3372	Kota Surakarta	75,77	79,55	75,86	79,55
3373	Kota Salatiga	76,07	79,85	76,16	79,85
3374	Kota Semarang	76,04	79,83	76,13	79,83
3375	Kota Pekalongan	72,86	76,53	72,86	76,53
3376	Kota Tegal	72,90	76,57	73,04	76,77

Kode	Prov/Kab/Kota	HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita	
		Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3300	JAWA TENGAH	12,76	13,03	8,42	7,62	16.102	10.513
3301	Cilacap	13,09	12,66	7,87	6,97	16.507	7.781
3302	Banyumas	13,16	13,36	8,19	7,54	17.955	8.583
3303	Purbalingga	12,24	12,00	7,58	7,11	14.502	10.231
3304	Banjarnegara	11,79	12,02	7,16	6,61	11.601	9.077
3305	Kebumen	13,37	13,56	8,23	7,43	12.675	8.934
3306	Purworejo	13,68	13,51	9,02	8,01	12.368	10.667
3307	Wonosobo	11,80	11,82	7,14	6,71	15.742	10.124
3308	Magelang	12,59	13,06	8,35	7,38	14.715	9.481
3309	Boyolali	12,38	13,41	8,74	7,52	18.396	13.172
3310	Klaten	13,39	13,54	9,89	8,68	14.301	12.426
3311	Sukoharjo	13,86	14,51	10,11	9,47	13.349	11.658
3312	Wonogiri	12,54	12,44	8,12	7,32	13.997	9.158
3313	Karanganyar	13,36	13,79	9,46	8,60	12.876	11.755
3314	Sragen	12,90	12,96	8,45	7,38	18.109	11.891
3315	Grobogan	13,80	12,46	7,88	6,77	16.422	8.006
3316	Blora	12,97	12,51	7,44	6,82	15.400	6.464
3317	Rembang	12,29	12,14	8,19	7,24	16.621	7.865
3318	Pati	13,08	12,96	8,32	7,50	15.800	10.436
3319	Kudus	13,22	13,48	9,64	8,87	16.212	11.227
3320	Jepara	12,76	13,19	8,68	7,86	15.570	9.084
3321	Demak	13,32	13,55	8,79	7,78	16.067	9.463
3322	Semarang	13,20	13,05	8,49	7,83	13.942	12.619
3323	Temanggung	12,53	12,85	7,57	7,46	11.924	9.372
3324	Kendal	12,85	13,39	8,14	7,34	16.368	11.554
3325	Batang	11,98	12,43	7,56	6,77	14.109	9.011
3326	Pekalongan	12,12	13,01	7,83	7,15	15.586	9.416
3327	Pemalang	12,23	12,01	7,02	6,20	14.037	6.700
3328	Tegal	13,27	12,83	7,82	6,88	15.602	8.138
3329	Brebes	12,53	12,19	6,92	5,90	16.047	7.607
3371	Kota Magelang	14,60	14,40	11,43	11,06	14.896	12.584
3372	Kota Surakarta	14,85	14,97	11,45	10,81	16.265	14.471
3373	Kota Salatiga	15,43	15,51	11,67	10,94	20.891	16.036
3374	Kota Semarang	15,76	15,54	11,54	10,47	17.549	15.238
3375	Kota Pekalongan	12,73	13,12	9,46	9,21	18.100	13.290
3376	Kota Tegal	13,08	13,40	9,53	8,83	19.386	12.801

Lampiran 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Beserta Komponennya, 2023

Kode	Prov/Kab/Kota	Persentase Perempuan Keterlibatan di Parlemen		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja		IDG
		Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3300	JAWA TENGAH	79,83	20,17	49,00	51,00	64,79	35,21	74,18
3301	Cilacap	74,00	26,00	59,03	40,97	73,58	26,42	70,38
3302	Banyumas	78,00	22,00	48,94	51,06	68,30	31,70	73,16
3303	Purbalingga	77,78	22,22	45,77	54,23	68,95	31,05	71,94
3304	Banjarnegara	74,00	26,00	51,51	48,49	70,81	29,19	74,30
3305	Kebumen	78,00	22,00	43,96	56,04	73,90	26,10	67,78
3306	Purworejo	82,22	17,78	40,86	59,14	64,40	35,60	70,77
3307	Wonosobo	95,56	4,44	55,34	44,66	75,70	24,30	48,92
3308	Magelang	86,00	14,00	44,47	55,53	62,45	37,55	70,52
3309	Boyolali	68,89	31,11	50,78	49,22	58,34	41,66	82,98
3310	Klaten	82,00	18,00	49,91	50,09	62,81	37,19	73,04
3311	Sukoharjo	77,78	22,22	47,60	52,40	58,07	41,93	79,28
3312	Wonogiri	84,00	16,00	50,51	49,49	61,04	38,96	72,64
3313	Karanganyar	84,44	15,56	45,24	54,76	61,09	38,91	71,65
3314	Sragen	86,67	13,33	50,63	49,37	62,68	37,32	67,91
3315	Grobogan	88,00	12,00	49,00	51,00	73,98	26,02	58,82
3316	Blora	93,33	6,67	47,83	52,17	64,91	35,09	60,86
3317	Rembang	86,67	13,33	53,38	46,62	67,51	32,49	66,98
3318	Pati	84,00	16,00	46,68	53,32	68,33	31,67	67,73
3319	Kudus	91,11	8,89	50,51	49,49	58,13	41,87	66,32
3320	Jepara	86,00	14,00	53,61	46,39	75,95	24,05	58,78
3321	Demak	86,00	14,00	40,08	59,92	61,68	38,32	68,56
3322	Semarang	80,00	20,00	47,74	52,26	52,64	47,36	77,86
3323	Temanggung	68,89	31,11	49,84	50,16	58,24	41,76	84,38
3324	Kendal	75,56	24,44	47,01	52,99	65,46	34,54	77,58
3325	Batang	82,22	17,78	40,98	59,02	71,64	28,36	65,63
3326	Pekalongan	75,00	25,00	45,01	54,99	74,18	25,82	69,78
3327	Pemalang	68,00	32,00	55,18	44,82	65,23	34,77	81,48
3328	Tegal	76,00	24,00	43,04	56,96	69,99	30,01	73,43
3329	Brebes	84,00	16,00	55,01	44,99	74,83	25,17	62,14
3371	Kota Magelang	76,00	24,00	40,45	59,55	57,58	42,42	79,51
3372	Kota Surakarta	75,56	24,44	53,43	46,57	54,45	45,55	81,92
3373	Kota Salatiga	76,00	24,00	45,11	54,89	58,35	41,65	79,48
3374	Kota Semarang	82,00	18,00	51,24	48,76	62,07	37,93	73,86
3375	Kota Pekalongan	85,29	14,71	46,83	53,17	71,44	28,56	65,31
3376	Kota Tegal	86,67	13,33	50,20	49,80	69,27	30,73	65,31

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

Jalan Pelem II No.8 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321055, Fax (0273) 321055

Homepage : <http://wonogirikab.bps.go.id> E-mail: bps3312@bps.go.id